

KEBIJAKAN LUAR NEGERI KANADA KELUAR DARI PROTOKOL KYOTO TAHUN 2011

Bahjatul Murtasidin

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Foreign Policy Out Canadian of the Kyoto Protocol in 2011. This research aims to explain factors of Canada withdrawal policy toward Kyoto Protocol in 2011 under Stephen Harper. This research uses Foreign Policy Theories by James N. Rossenau, and applies qualitative research method. The Research show that Canada withdrawal policy toward Kyoto Protocol in 2011 is affected by five factor. First, Harper's views on Kyoto Protocol. Second, the ideology of conservative party which was the winning and most dominated party in Canada's parliament. Third, the dynamics of Canada's federal government and provincial government relations that has some problem in jurisprudence matters. Forth, overall domestics condition of Canada's environment and its national interests. And the final factor, international systems which shows some inconsistencies of big power states on Kyoto Protocol. The most dominant factor is Harper's views on Kyoto Protocol and the ideology of conservative party.

Abstrak: Kebijakan Luar Negeri Kanada Ke luar dari Protokol Kyoto Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor dari Kanada kebijakan penarikan terhadap Protokol Kyoto pada 2011 di bawah Stephen Harper. Penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri oleh James N. Rossenau, dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian shaw bahwa Kanada kebijakan penarikan terhadap Protokol Kyoto pada 2011 dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, pandangan Harper pada Protokol Kyoto. Kedua, ideologi partai konservatif yang merupakan partai yang menang dan yang paling mendominasi di parlemen Kanada. Ketiga, dinamika pemerintah federal Kanada dan hubungan pemerintah provinsi yang memiliki beberapa masalah dalam hal hukum. Sebagainya, kondisi rumah tangga keseluruhan lingkungan Kanada dan kepentingan nasional. Dan faktor terakhir, sistem internasional yang menunjukkan beberapa inkonsistensi dari negara kekuatan besar pada Protokol Kyoto. Faktor yang paling dominan adalah pandangan Harper pada Protokol Kyoto dan ideologi partai konservatif.

Kata Kunci: protokol kyoto, kebijakan luar negeri, Stephen Harper.

PENDAHULUAN

Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Kanada keluar dari Protokol Kyoto pada tahun 2011. Peneliti memilih Kanada sebagai objek dalam penelitian ini karena terdapat perubahan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Kanada. Pada awalnya, Kanada merupakan salah satu negara yang meratifikasi Protokol Kyoto, dan kemudian ke luar sebelum masa penerapan Protokol Kyoto berakhir. Keputusan ini menjadikan Kanada sebagai negara pertama yang keluar dari Protokol Kyoto.

Bagi Kanada, kebijakan luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh bangsa dalam mengekspresikan dirinya kepada dunia internasional. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Kanada merupakan cerminan keyakinan negara Kanada, yang diartikulasikan melalui keputusan yang dibuat dan diimplementasikan atas nama Kanada. Keeng-

ganan Stephen Harper untuk mengimplementasikan Protokol Kyoto ditegaskan dalam konferensi perubahan iklim di Durban-Afrika Selatan yang berlangsung pada tanggal 28 November sampai 9 Desember 2011. Pernyataan ini kemudian dipublikasikan dalam konferensi pers di depan gedung parlemen di Ottawa-Kanada pada tanggal 12 Desember 2011. Melalui Menteri Lingkungan Kanada Peter Kent, Kanada memutuskan mundur dari Protokol Kyoto.¹ Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kanada ke luar dari Protokol Kyoto.

Penelitian ini ditulis berdasarkan pada paradigma behavioralis dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri menurut James N. Ro-

¹ Statement by Minister Kent” Diakses dari <http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=En&n=FFE36B6D-1&news=6B04014B-54FC-4739-B22C-F9CD9A840800> pada 30 Oktober 2015.

senau. James N. Rosenau mengelompokkan variabel-variabel yang mempengaruhi pembuatan keputusan luar negeri dalam lima kategori antara lain²:

Pertama, Faktor Ideosentrik (Faktor Individual). Faktor individu ini berkaitan dengan segala atribut dan karakteristik pribadi *decision maker*. Karakteristik-karakteristik tersebut termasuk pada persepsi, imej, kondisi psikologis dan lain-lain. Kita bisa melihat para pemimpin-pemimpin besar dunia seperti Hitler, Mussolini, Churchill, Ahmadinejad, dan lain-lain memiliki karakteristik individual yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki ciri khasnya. Para pemimpin ini berpengaruh besar dalam perumusan keputusan luar negeri.

Variabel Individual atau ideosinkretik berkaitan dengan persepsi, *image*, dan karakteristik pribadi si pembuat keputusan. Artinya dalam merumuskan suatu kebijakan, aktor individu tidak akan terlepas dari pengaruh ideosinkretis. Pengaruh ideosinkretis ini termasuk di dalamnya ideologi, kepercayaan, budaya, tujuan dan lain sebagainya.

Kedua, Faktor Peranan. Faktor peranan merupakan gambaran pekerjaan atau sebagian aturan-aturan perilaku yang dihadapkan bagi presiden, menteri-menteri kabinet, birokrat, wakil-wakil di kongres, dan lain-lain. Terlepas dari kondisi psikologisnya, jabatan dengan tugas yang spesifik akan mempengaruhi para pembuat keputusan untuk merumuskan keputusan luar negeri. Sebagai contoh sederhana, definisi peranan ketua partai komunis Cina berbeda dengan definisi peranan perdana menteri Inggris.

Faktor peranan dapat didefinisikan sebagai gambaran pekerjaan atau aturan-aturan perilaku yang diharapkan publik kepada kelompok-kelompok tertentu, dan memandang bahwa keputusan final yang merupakan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kepentingan dan keinginan individu, tetapi lebih merupakan manifestasi dari kepentingan kelompok. Kelompok yang dimaksud di sini bisa merupakan kelompok kepentingan, kelompok penekan, ataupun kelompok lain yang mempunyai posisi strategis dan

kepentingan tertentu di pemerintahan dan berusaha mempengaruhi kebijakan politik yang dibuat pemerintah. Faktor ini digunakan untuk menjelaskan keputusan-keputusan yang bersifat pragmatis.

Ketiga, Faktor *Governmental*. Faktor ini berhubungan dengan struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. Graham T. Allison berpendapat bahwa kompleksitas birokratis merupakan karakteristik normal yang terdapat hampir di semua negara, termasuk negara-negara terbelakang³. Dalam konteks ini pembuatan keputusan akan disesuaikan antara isu dan institusi yang menanganinya. Contoh, isu militer akan digunakan pertimbangan dari institusi birokrasi bidang pertahanan dan keamanan negara.

Faktor birokrasi, menyangkut struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. Allison yang memperkenalkan variabel ini mengatakan bahwa dengan memandang politik sebagai rencana-rencana yang diturunkan secara rasional yang dirancang untuk memaksimasimasi kepentingan utama unit-unit abstrak dan monolitik yang kita sebut negara. Artinya keputusan tidak dipandang sebagai produk rasionalitas individu tetapi lebih merupakan produk dari berbagai penyesuaian dan kompromi.

Keempat, Faktor Nasional. Pembuatan keputusan berdasarkan kategori ini mengikut sertakan berbagai atribut nasional yang mempengaruhi hasil politik luar negeri. Variabel-variabel ini meliputi elemen-elemen dasar penyokong kepentingan nasional seperti geografis, sejarah, sumber daya manusia, sumber daya alam, kualitas diplomasi, sistem politik dan pemerintahan, dan lain-lain. Termasuk pula di dalamnya unsur-unsur power, identitas nasional, ideologi, dan kepentingan nasional. Interaksi antar unsur-unsur tersebut nantinya akan membentuk suatu sistem yang berupa sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial-budaya bagi negara tersebut. Sistem-sistem inilah yang secara komprehensif tercakup dalam sistem nasional masing-masing

² *Ibid.* Hal 95-150.

³ Allison. *Essence of Decision*; Morton Halperin, *Bureaucratic Politics and Foreign Policy* (Washington, D.C : Brookings-Institution, 1974)

negara. Misalkan tindakan Korea Utara yang menutup diri dari pasar global dikarenakan negara tersebut menganut ideologi *self-reliance*.

Kelima, Faktor Sistemik. Faktor ini merupakan kondisi-kondisi di sistem internasional yang mempengaruhi kondisi dalam negeri suatu negara. Faktor ini meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan negara lain yang bisa merangsang respons politik negara yang dipelajari. Contoh: pertarungan ideologi besar antara Timur dan Barat pada masa perang dingin membuat Indonesia mengeluarkan konsep politik luar negeri bebas aktif sebagai bentuk tanggapan terhadap dua ideologi besar ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor dari Kanada kebijakan penarikan terhadap Protokol Kyoto pada 2011 di bawah Stephen Harper.

METODE

Tulisan ini telah menjelaskan bagaimana kondisi internal dan eksternal sebuah negara mempengaruhi kebijakannya terhadap sebuah komitmen internasional. Kondisi lingkungan memang menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi negara-negara industri, namun kepentingan nasional dan sistem internasional yang tidak menunjukkan efektivitas dalam Protokol Kyoto membuat Kanada harus keluar dari Protokol Kyoto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lima Faktor dalam teori Rosenau menghasilkan lima faktor yang menjadi jawaban mengapa Kanada keluar dari Protokol Kyoto. Masing-masing faktor dimulai dari faktor variabel idiosintratik hingga pada faktor sistem internasional menghasilkan pemahaman tersendiri bagi Kanada untuk keluar dari Protokol Kyoto. Pertimbangan dari lima faktor ini menjadikan kebijakan keluar sebagai kebijakan yang rasional.

Faktor Idiosinkratik

Faktor idiosinkratik, berasal dari pribadi Stephen Harper sebagai Perdana Menteri Kanada yang berasal dari Partai Konservatif. Kemenangan Harper meraih posisi Perdana Menteri pada pemilu parlemen 23 Januari 2006 benar-benar membawa angin perubahan. Kubu Liberal

yang telah berkuasa selama 12 tahun dipaksa meninggalkan gelanggang kekuasaan. Pemilu tersebut merupakan yang kedua dalam 18 bulan terakhir dan digelar setelah pada November 2005 saat menjatuhkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan pimpinan Paul Martin. Sebanyak 22,7 juta pemilih mendatangi 60 ribu tempat pemungutan suara yang terbentang dalam enam wilayah waktu, mulai dari Samudera Atlantik hingga Hindia⁴. Walau begitu, tingkat partisipasi warga Kanada dalam pemilu diyakini tak lebih dari 60 persen, sehingga merupakan tingkat partisipasi pemilu terendah sejak 1868.

Dari semua isu yang mengkonfrontasi pemerintahan Harper, perubahan iklim telah menyita banyak perhatian dan menyebabkan masalah. Sebetulnya, berdasarkan komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintahan Harper, jelas terlihat bahwa perubahan iklim adalah isu yang menjadi usaha tersulit pemerintahan Harper, dengan platform yang bocor (*leaky platform*), kredibilitas publik yang kecil, dan pegawai-pegawai yang sering kehilangan pijakan. Harper menilai bahwa untuk menjaga lingkungan dan mencegah emisi gas rumah kaca, Protokol Kyoto bukanlah satu-satunya cara, dan bahkan bukanlah salah satu cara yang tepat⁵. Oleh karena itu, Harper memiliki caranya sendiri dalam menangani isu lingkungan tanpa harus berkomitmen pada Protokol Kyoto yang sejatinya merugikan Kanada dan menguntungkan negara-negara industry lain.

Implementasi Kebijakan Environmental pada Masa Harper dapat dilihat dengan dua pendekatan strategis antara lain: Pertama, Strategi Prosedural dan Institusional. Terjadinya pergeseran yang cukup signifikan pada pendekatan yang digunakan oleh pemerintah Harper (pasca mendapat perolehan suara mayoritas dalam pemerintahan) dalam memandang isu-isu permasalahan lingkungan. Kedua, Instrumen Substansif. Pemerintah Kanada melaksanakan

⁴ Michael D. Behiels., "Stephen Harper's Rise to Power" (PDF) *American Review of Canadian Studies* Spring 2010, Vol. 40 Issue 1, pp. 118-45.

⁵ Mark Winfield. 2014. *Implementing Environmental Policy in Canada*. York: York University Working Paper. Hal. 14.

sekaligus menarik diri dari syarat-syarat regulasi yang berhubungan dengan lingkungan. Artinya keseriusan Kanada dalam isu lingkungan bersifat parsial. (Pasal C-45 mencabut *Navigable Waters Protection Act*; Lemahnya penerapan pasal C-38 tentang Perikanan. Hasilnya, Harper kemudian menjalankan model implementasi yang baru dalam menangani masalah lingkungan.

Faktor Pengaruh Ideologi Partai Konservatif

Partai Konservatif memiliki pandangan yang berbeda terhadap Protokol Kyoto, dimana pada Mei 2006, Menteri Lingkungan Hidup Kanada menyampaikan pernyataan di Bonn, bahwa target Protokol Kyoto terlalu ambisius dan pada November di tahun yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Kanada menyatakan bahwa Kanada tidak berniat untuk mencapai target Protokol Kyoto.

Wujud nyata dari perubahan sikap Pemerintah Kanada terhadap Protokol Kyoto terbukti ketika pada 12 Desember 2011, melalui Menteri Lingkungan Hidupnya, Pemerintah Kanada secara resmi memberikan pengumuman pengunduran dirinya. Akhirnya pada tahun 2012, Pemerintah Kanada mencabut undang-undangnya yang terkait dengan Protokol Kyoto yakni *Kyoto Protocol Implementation Act*.

Terjadinya pergantian rezim penguasa dari rezim pemerintahan liberal ke rezim pemerintahan konservatif mendorong terjadinya proses perubahan kebijakan publik. Dalam konteks penelitian ini, rezim konservatif yang sejak awal mengambil posisi yang berlawanan dengan rezim liberal terkait dengan kebijakannya meratifikasi Protokol Kyoto sebagai sebuah solusi dan komitmen politik bersama masyarakat internasional mengatasi masalah emisi gas buang, yang oleh konservatif dianggap sebagai sebuah kebijakan yang sarat dengan pencitraan dan berpotensi mengantarkan Kanada pada sanksi internasional terkait dengan ketidakmampuannya dalam memenuhi target penurunan emisi gas buang.

Faktor Dinamika Federal dan Provinsi

Dinamika hubungan antara Pemerintah Federal dan Pemerintah Provinsi di Kanada memiliki pengaruh tersendiri dalam kebijakan luar

negeri Kanada yang menyatakan keluar dari Protokol Kyoto. Adalah hal yang sangat sulit dalam pelaksanaannya bagi pemerintah federal untuk mendapatkan efisiensi sosial dibandingkan dengan model-model ekonomi yang terhambat karena adanya komitmen dari Protokol Kyoto. Terdapat banyak alasan tentang ini. Barry C Field dan Nancy D dalam tulisannya "*Environmental Policy in Canada*", menyatakan bahwa Efisiensi ekonomi hanyalah satu tujuan yang memungkinkan dalam kebijakan lingkungan. Motivasi-motivasi lainnya termasuk ekuitas (keadilan) memastikan distribusi yang fair antara *costs and benefits* dari target kebijakan tentang lingkungan. Pemerintah juga didesak oleh kekuatan konstitusi, legislasi, dan kehadiran atau absennya institusi tertentu.

Ada beberapa poin penting yang menyertai dinamika hubungan antara pemerintah federal dan provinsi di Kanada. Pertama, fondasi konstitusional untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan mengenai lingkungan di Kanada. Kedua, berkaitan dengan ulasan dari agensi-agensinya yang memaksa dan membuat kebijakan lingkungan Kanada, dan arah regulasi pemerintah federal Kanada mengenai lingkungan.

Proses regulatori di Kanada terlihat jelas bergantung pada kepentingan-kepentingan setiap level di bawah sistem parlementer. Karena cabang pemerintahan legislative dan eksekutif tidak terpisah ketika terdapat aturan mayoritas, partai yang berkuasa mengontrol agenda legislasi kebijakan. Tekanan publik dapat mempengaruhi kebijakan, namun terdapat sedikit kebijakan lingkungan publik yang dirumuskan oleh pemerintah federal. Namun Kanada tidak membuat instrument kebijakan-kebijakan yang spesifik, terutama, kurangnya kebijakan berbasis insentif yang cukup tegas pada polusi, sebagai langkah utama dalam mengatasi permasalahan lingkungan.

Faktor Kebutuhan Nasional

Kanada harus mempertaruhkan perekonomiannya dengan membatasi gas buangan pada sektor industri, selain itu juga Kanada tidak ingin membayar kompensasi pada Protokol Kyoto sebagai akibat ketidakmampuannya dalam mencapai target emisi gas buang sebesar 6% sebagai-

mana yang tertuang dalam Protokol Kyoto. Para pelaku ekonomi dan kalangan dunia usaha sebagian besar menyatakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintahan liberal yang meratifikasi Protokol Kyoto.

Perumahan, komersial/kelembagaan, industri, transportasi, dan pertanian merupakan konsumen akhir sektor ekonomi Kanada yang mengkonsumsi energi. Antara tahun 1990 sampai 2009, konsumsi energi sektor ekonomi Kanada meningkat 23,2 persen. Sebagian besar peningkatan didorong oleh aktifitas transportasi dan industri sebesar 37,2 dan 16,9 persen. Kondisi seperti ini diikuti oleh sektor komersial/kelembagaan dan perumahan dengan peningkatan di masing-masing sektor sebesar 36,8 dan 10,9 persen. Peningkatan konsumsi energi sektor transportasi banyak berasal dari peningkatan konsumsi energi untuk transportasi barang sebagai dampak dari konsep *just in time* (JIT) industri. Sedangkan untuk sektor industri, peningkatan konsumsi energi banyak berasal dari industri pertambangan atau non-manufaktur. Peningkatan konsumsi energi sektor komersial/kelembagaan didominasi oleh peningkatan konsumsi energi untuk pengoperasian komputer sebagai dampak dari peningkatan layanan perdagangan. Sementara peningkatan konsumsi energi sektor perumahan lebih disebabkan oleh faktor iklim yang digunakan sebagai pemanas ruangan⁶.

Dalam aktifitas perdagangan atau ekspor-impor, energi memiliki peran penting bagi ekonomi Kanada. Antara tahun 2007 sampai 2011, produk energi merupakan komoditas ekspor terbesar kedua Kanada. Dalam rentang waktu yang sama, total ekspor produk energi Kanada mencapai C\$499,1 milyar. Sementara impor produk energi hanya mencapai C\$217,6 milyar. Tingginya ekspor produk energi Kanada disebabkan harga produk energi yang mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen dan perluasan pasar ekspor ke wilayah Asia-Pasifik, terutama Cina. Sedangkan impor produk energi, banyak dipengaruhi oleh naik-turunnya jumlah produksi industri untuk tujuan ekspor⁷.

Sejalan dengan upaya Pemerintah Partai Konservatif untuk memulihkan perekonomian melalui peningkatan integrasi perdagangan, pembayaran denda sebesar US\$14 milyar dan pemaksaan pemenuhan target penurunan atau pengurangan emisi di bawah Protokol Kyoto yang akan berakhir pada akhir tahun 2012 dapat memperburuk kondisi perekonomian Kanada.

Faktor Internasional: Komitmen Negara Lain terhadap Protokol Kyoto

Protokol Kyoto sebagai langkah untuk menanggulangi masalah perubahan iklim tidak dapat berjalan dengan efektif. Ketidakefektifan disebabkan beberapa negara tidak memberikan kontribusi dalam menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer melalui tindakan penurunan atau pengurangan emisi secara wajib. Efektifitas dapat dicapai jika seluruh negara terutama yang berkontribusi besar terhadap emisi global memiliki kewajiban penurunan atau pengurangan emisi. Jika negaranegara tersebut tidak memiliki kewajiban penurunan atau pengurangan emisi maka mereka tidak memiliki target penurunan dan pembatasan emisi. Negara-negara yang tidak memiliki target penurunan dan pembatasan emisi memiliki dua kriteria⁸: Pertama, negara-negara Annex I bukan peratifikasi Protokol Kyoto; dan Kedua, negara-negara Non-Annex dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Amerika Serikat dan Cina merupakan negara-negara pengemisi terbesar yang tidak memiliki target penurunan dan pembatasan emisi di bawah Protokol Kyoto⁹. Keterlibatan Amerika Serikat dan Cina akan memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat keberhasilan dari Protokol Kyoto. Sebagai negara-negara pengemisi terbesar, Amerika Serikat dan Cina harus mengikatkan diri pada Protokol Kyoto agar dapat

⁶ Natural Resources Canada (NRC), "Energy Use Data Handbook 1990 to 2009" (Ottawa: NRC, 2012), hal. 4-7.

⁷ Statistics Canada (SC), Annual Review 2011, "International Merchandise Trade" (Ottawa: SC, 2012), hal. 8-9.

⁸ Yda Schreuder, *The Corporate Greenhouse: Climate Change Policy in a Globalizing World* (New York: Zed Books Ltd., 2009), hal. 12.

⁹ "Statement by Minister Kent", <http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=En&n=FFE36B6D-1&news=6B04014B-54FC-4739-B22C-F9CD9A840800> [1 Januari 2016].

memberikan hasil penurunan atau pengurangan emisi global secara nyata.

Amerika Serikat dan Cina adalah negara-negara yang berkontribusi besar terhadap emisi global jika dibandingkan dengan Kanada sebagai negara Annex I peratifikasi Protokol Kyoto. Perbedaan emisi Amerika Serikat dan Cina dengan Kanada terpaut cukup jauh, baik pada tahun 1990 maupun 2009. Pada tahun 1990, Amerika Serikat dan Cina masing-masing kontribusi sebesar 23,2 dan 10,7 persen terhadap emisi global, sementara Kanada hanya berkontribusi sebesar 2,1 persen. Tingkat kontribusi emisi yang relatif sedikit tetap dipegang oleh Kanada di tahun 2009, namun tidak bagi Amerika Serikat dan Cina dimana keduanya mengalami perubahan. Pada tahun 2009, Kanada tetap konsisten dalam berkontribusi kecil terhadap emisi global dan bahkan mengalami penurunan, yakni sebesar 1,8 persen.¹⁰

SIMPULAN

Pengaruh individu, ideologi, dan kondisi dalam negeri sebuah negara sangat menentukan arah kebijakan luar negeri dari negara tersebut. Faktor Idiosinkratik, individu dari Stephen Harper adalah faktor yang paling dominan dalam perumusan kebijakan Kanada. Secara pribadi Harper sebelum dan sesudah ia menjadi Perdana Menteri telah menyatakan bahwa Protokol Kyoto adalah langkah yang tidak efektif bagi Kanada. Faktor yang kedua, pengaruh dari Partai Konservatif Kanada turut mempengaruhi perumusan kebijakan Kanada. Partai Konservatif memiliki pandangan yang berbeda terhadap Protokol Kyoto tidak seperti Partai Liberal yang saat itu berkuasa dan meratifikasi Kyoto. Hal ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan luar negeri suatu negara juga dipengaruhi oleh Partai yang berkuasa di negara tersebut. Faktor yang ketiga, dinamika politik domestik juga ikut menjadi pengaruh dalam perumusan kebijakan luar negeri di Kanada. Permasalahan pada Kekuatan Konstitusi Kanada terhadap Isu Lingkungan menyebabkan Protokol Kyoto “seolah tidak ber-

harga” di dalam negeri. Faktor yang keempat, kebutuhan nasional Kanada dari segi ekonomi, energi, dan kondisi geografis. Ketergantungan masyarakat Kanada terhadap penggunaan energi listrik untuk penghangat ruangan cukuplah tinggi. Faktor yang kelima, Ketidakterikatan Amerika Serikat dan Cina di bawah Protokol Kyoto dapat mengakibatkan gagalnya upaya penanggulangan perubahan iklim melalui tindakan penurunan atau pengurangan emisi global.

DAFTAR RUJUKAN

- Behiels, Michael D., “Stephen Harper’s Rise to Power” (PDF) *American Review of Canadian Studies* Spring 2010, Vol. 40 Issue 1, pp. 118–45.
- Browne, Tom., 2003, *Canada’s response to Kyoto: Economic Impact on the Canadian Paper Industry* (Vol. 104 No.1 Januari)
- D. H. Burney et.al., *Linkage: Foreign Policy, National Interest, and Prosperity* (CDFAI Submission to the Competition Policy Review Panel, Canadian Defence and Foreign Affairs Institute: 2008
- D. H. Burney et.al., 2008, *Linkage: Foreign Policy, National Interest, and Prosperity* (CDFAI Submission to the Competition Policy Review Panel, Canadian Defence and Foreign Affairs Institute.
- Daniel Murdiyarto., 2003, *Protokol Kyoto Implikasinya Bagi Negara Berkembang*, Kompas: Jakarta.
- Desonie, Dana., 2008, *Climate: Causes and effects od Climate Change*. Chelsea House: New York.
- Fatkurrohman. 2009. *Pemanasan Global dan Lubang Ozon: Bencana Masa Depan*. Yogyakarta : Media Wacana.
- Singer, J. David., 2007 ‘*The Level-of-Analysis Problem in International Relations*’, dalam *World Politics, Vol. 14, No. 1, The Johns Hopkins University Press*.
- Tuti Suryati, et.al., 2007, *Pemanasan Global dan Keanekaragaman Hayati*, (Jurnal Teknologi Lingkungan, vol.8 no.1, Jakarta)

¹⁰ International Energy Agency (IEA), “CO2 Emissions from Fuel Combustion”, 2011 Editions (Paris: IEA, 2011), hal. 46-48.